

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anggara, Sahya. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Faisal, Sanafiah. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Kosasih, Ade, John Kenedi, dan Imam Mahdi. *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia*. Bengkulu: Penerbit Vanda, 2017.
- Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Nasution, Bahder Johan. *Pemahaman Konseptual tentang Hukum Administrasi Negara dalam Konteks Ilmu Hukum*.
- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Pamuji, Kadar, Abdul Aziz Nasihuddin, Kartono, Siti Kunarti, Tedi Sudrajat, Sri Wahyu Handayani, Sri Hartini, Weda Kupita, dan Eny Dwi Cahyani. *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*. 2023.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Utama, Yos Johan. *Hukum Administrasi Negara*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2021.

B. Artikel Jurnal

Dwiono. “Kewenangan Kepala Desa dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Lampung Utara.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 5, no. 1 (2025).

Gandara, Moh. “Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat.” *Khazanah Hukum* 2, no. 3 (2020).

Gosal, Kezia Trivena, Toar Neman Palilingan, dan Josepus J. Pinori. “Tinjauan Yuridis Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 di Desa Tandengan Satu Kabupaten Minahasa.” *Lex Privatum* 13, no. 3 (2024).

Guslan, Odie Faiz. “Tinjauan Yuridis Mengenai Batasan Antara Perbuatan Maladministrasi Dengan Tindak Pidana Korupsi.” 2018.

Hasanah, Firdaus, Syahrul Ibad, dan Dairani. “Perlindungan Hukum Terhadap Perangkat Desa Yang Diberhentikan Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan.” 2 (2025).

Hasanuddin. “Perlindungan Hukum Bagi Perangkat Desa yang Diberhentikan Secara Sepihak oleh Kepala Desa.” *Jurnal Hukum dan Keadilan Publik* 9, no. 1 (2024).

Iksan, Muchamad. “Asas Legalitas dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah).” 11, no. 01 (2017): 1–26.

Japitra, Aditia, dan Jasardi Gunawa. “Tinjauan Yuridis Peraturan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.” *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 1, no. 1 (2023): 82–88.

Jassinta, Melani Aulia Putri, dan Anna Erliyana. “Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara yang Berlaku Retroaktif.” 10 (2025): 222–248.

- Kamarullah. *Keputusan Tata Usaha Negara yang Merupakan Perbuatan Hukum Perdata*. Disertasi, Universitas Hasanuddin, 2019.
- Kamu, Vidya Christiane Tiffany. “Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa di Desa Toraget Kecamatan Langowan Utara.” *Lex Crimen* 10, no. 13 (2021).
- Mangindaan, Boky, dan Kairupan. “Analisis Yuridis terhadap Keputusan Kepala Desa dalam Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Felisia.” *Journal of Legal Studies* 4, no. 2 (2023).
- Mangindaan, Reynaldi Jan, Devy K. G. Sondakh, dan Refly R. Umbas. “Analisis Yuridis Pemberhentian Perangkat Desa di Minahasa Utara.” *Lex Privatum* 12, no. 3 (2023).
- Nggolu, Rizal La, Darmawati, dan Rusmuliadi. “Analisis Prosedur Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Transpatoa Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.” 6, no. 8 (2025): 1–16.
- Nurhayati, dan Rafiqah. “Penerapan Asas Legalitas dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.” *Jurnal Ilmu Hukum dan Pemerintahan Daerah* 3, no. 2 (2021).
- Purbodiyono. “Kewenangan Kepala Desa dalam Pemberhentian Perangkat Desa Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara.” *Jurnal Hukum Administrasi Negara* 7, no. 1 (2022).
- Sitorus, Grece Celina, Romauli Panjaitan, Reynold Simanjuntak, dan Henry Noch Lumenta. “Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986: Unsur Formil, Materil, dan Batas Kewenangan.” 9, no. 1 (2025): 211–232.
- Syamsudin, dan Dewi Kartika. “Implementasi Permendagri No. 67 Tahun 2017 dalam Pemberhentian Perangkat Desa.” *Jurnal Hukum dan Kebijakan Desa* 6, no. 2 (2022).

C. Wawancara

- Arifin. Perangkat Desa Setu Kulon. Wawancara oleh penulis. Cirebon, 05 Februari 2026.

D. Dokumen Hukum

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 173 Tahun 2023 tentang Perangkat Desa.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016
tentang Laporan Kepala Desa.

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Putusan Nomor
125/G/2024/PTUN.BDG.

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Penetapan Nomor
125/Pen.BHT/G/2024/PTUN.BDG.

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Surat Keterangan Putusan
Berkekuatan Hukum Tetap Nomor 125/Ket.BHT/G/2024/PTUN.BDG.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON